

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntansi merupakan suatu ilmu yang terus berkembang dari masa ke masa yang berfungsi untuk memberikan informasi secara kuantitatif maupun kualitatif atas kinerja suatu entitas dalam bentuk laporan keuangan selama periode waktu tertentu kepada para pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan-keputusan penting.

Himmah (2009:03), menjelaskan bahwa dalam menyusun laporan keuangan, akuntansi dihadapkan pada kemungkinan bahaya penyimpangan, dan ketidaktepatan. Untuk meminimumkan bahaya ini, profesi akuntansi mengesahkan seperangkat standar dan prosedur umum yang disebut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Standar akuntansi yang berlaku umum di perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik signifikan adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sedangkan standar akuntansi yang berlaku khusus, yaitu untuk perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan (menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal) adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diterapkan pada koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan perusahaan lain yang belum *go public*.

SAK ETAP disahkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK-IAI) pada tanggal 19 Mei 2009. SAK-ETAP diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Kehadiran SAK ETAP diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk koperasi, UMKM, dan entitas tanpa akuntabilitas lainnya dalam menyajikan laporan keuangan. SAK ETAP juga diharapkan menjadi solusi permasalahan internal perusahaan, terutama bagi manajemen yang hanya melihat hasil laba yang diperoleh tanpa melihat kondisi keuangan yang sebenarnya.

Sesuai dengan ruang lingkup SAK-ETAP (IAI, 2009:1.1a-1.1b), maka standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Tujuan dari SAK ETAP sendiri yakni untuk memberikan kemudahan bagi entitas skala kecil dan menengah. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelola usaha, kreditur, dan entitas tanpa akuntabilitas lainnya. SAK-ETAP yang merupakan penyederhanaan dari SAK umum lebih mudah digunakan dan lebih sesuai dengan kondisi entitas tanpa akuntabilitas publik seperti koperasi.

Perekonomian Indonesia sangat identik dengan koperasi. UU No.25 Tahun 1992 mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pembangunan koperasi sebagai badan usaha ditujukan pada penguatan dan perluasan basis usaha, peningkatan mutu sumber daya manusia terutama pengurus, pengelola dan anggotanya yang berakhlak mulia, termasuk kewirausahaan dan profesionalisme koperasi, sehingga dengan kinerja yang makin sehat, kompetitif dan mandiri, koperasi mampu menjadi badan usaha utama dalam perekonomian.

Dalam UU No.25 Tahun 1992 Pasal 5 disebutkan bahwa dalam pelaksanaannya koperasi memiliki beberapa prinsip, adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain, keanggotannya bersifat terbuka dan sukarela, pengelolaan yang dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal, serta kemandirian. Namun sangat disayangkan, perkembangan koperasi yang diharapkan dapat menjadi salah satu tonggak perekonomian Indonesia masih mengalami berbagai hambatan-hambatan, dari mulai keterbatasan dana sampai kurangnya sumber daya manusia yang professional yang dapat mengelola koperasi dengan baik. Padahal keberadaan koperasi sangat membantu para anggotanya dalam meningkatkan taraf kesejahteraan mereka, agar koperasi tersebut dapat menjadi seperti yang diharapkan, mestinya memang ada suatu standar yang dapat mengatur pengelolaan koperasi itu sendiri, sehingga dalam pengelolaannya manajemen memiliki

tuntunan agar dapat membawa koperasi tersebut menjadi lebih baik, termasuk standar penyusunan laporan keuangan (Nurdita, 2013:01).

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Republik Indonesia Nomor : 04/PER/M.KUKM/VII/2012 menyebutkan bahwa tugas pemerintah dalam membangun dan mengembangkan koperasi sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat adalah untuk mewujudkan koperasi yang dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas yang dapat diakui, diterima dan dipercaya, baik oleh anggota pada khususnya maupun masyarakat luas pada umumnya. Salah satu indikator terlaksananya penerapan prinsip tersebut adalah melalui penyelenggaraan akuntansi secara benar dan tertib. Oleh karena koperasi memiliki identitas, maka penerapan akuntansi dan penyampaian laporan keuangannya juga menunjukkan kekhususan dibanding dengan akuntansi dan laporan keuangan badan usaha lain pada umumnya. Laporan keuangan koperasi menyajikan informasi yang menyangkut kondisi, kinerja dan perubahan posisi keuangan koperasi, yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan strategis untuk pengembangan koperasi.

Koperasi Pasar Gondanglegi (KPG) merupakan suatu organisasi atau entitas yang bergerak dalam menyediakan jasa simpan pinjam untuk para anggotanya. Sampai akhir tahun 2014 pertumbuhan ekonomi negara kian meningkat. Peningkatan ekonomi ini sangat berpengaruh terhadap dunia usaha khususnya pedagang pasar yang akibatnya berdampak langsung

terhadap kelangsungan usaha Koperasi Pasar Gondanglegi (KPG). Oleh karena itu Koperasi Pasar Gondanglegi (KPG) harus membuat laporan keuangan dengan siklus akuntansi yang tepat.

Siklus akuntansi merupakan suatu proses penting dalam akuntansi yang dilakukan secara terus menerus dan berurutan, dan setiap proses yang ada di akuntansi merupakan sumber informasi dan data untuk menuju pada proses yang selanjutnya. Menurut Harahap (2003:16) siklus akuntansi adalah proses pengolahan data sejak terjadinya transaksi, kemudian transaksi ini memiliki bukti yang sah sebagai dasar terjadinya transaksi kemudian berdasarkan data atau bukti ini, maka diinput ke proses pengolahan data sehingga menghasilkan output berupa informasi laporan keuangan.

Seperti layaknya perusahaan pada umumnya, siklus akuntansi koperasi yang bergerak di bidang jasa diawali dari terjadinya (1) transaksi, dengan tindak lanjut menganalisis bukti transaksi, (2) mencatat ke dalam Jurnal Umum, (3) mengelompokkan ke dalam buku besar, (4) merangkum ke dalam neraca saldo, (5) mengikhtisarkan ke dalam kertas kerja, (6) menyajikan ke dalam Laporan Keuangan (Neraca, Laporan Laba-Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan). Hal ini dilakukan secara terus menerus dan berurutan, karena setiap proses yang ada di akuntansi merupakan sumber informasi dan data untuk menuju pada proses yang selanjutnya. Jadi tanpa proses analisis, proses berikutnya tidak akan bisa dilakukan. Apabila bisa dilakukan,

hasilnya tidak akan memenuhi kriteria untuk digunakan dalam proses yang selanjutnya.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 telah dijelaskan tentang prinsip dasar yang universal dalam akuntansi yaitu, (1) prinsip pertanggungjawaban (*accountability*), dengan wujud pertanggungjawabannya biasanya dalam bentuk pelaporan akuntansi, (2) prinsip keadilan, dalam konteks ini dapat diartikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan benar, dan (3) prinsip kebenaran, yang akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi akuntansi.

Penyusunan laporan keuangan menjadi salah satu komponen penting yang harus dimiliki setiap entitas jika mereka ingin mengembangkan usahanya. Begitu pula dengan SAK ETAP yang mengatur pembuatan laporan keuangan untuk koperasi. Akan tetapi penerapan SAK ETAP masih sangat rendah di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian oleh Auliyah (Penerapan Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP pada UKM Kampung Batik Sidoarjo), Mulyani (Analisis Penerapan SAK ETAP pada Koperasi Mandiri Jaya Tanjungpinang dan Koperasi Karyawan Plaza Hotel Tanjungpinang), Salprida (Akuntansi Koperasi Berbasis SAK ETAP Pada Koperasi Petani Karet Karya Harapan (KOPTAN-KKH) Rokan Hulu), Wahyuningsih (Uji Kepatuhan Penyusunan Laporan Keuangan Pada KPRI Warga Jaya Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Tahun Buku 2012), Arsani & Wayan (Perlakuan Akuntansi

Pendapatan Dan Beban Berbasis SAK ETAP dan Implikasinya Pada Laporan Keuangan KSP Duta Sejahtera), Pratiwi, Sondakh, & Kalangi (Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Penyajian Laporan Keuangan PT. Nichindo Manado Suisan) dapat memperjelas bahwa kebanyakan entitas tanpa akuntabilitas publik kurang paham tentang SAK ETAP, jadi dalam penyusunan laporan keuangan pun hanya sebatas laporan bisnis yang dibuat sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan masing-masing entitas.

Penyusunan laporan keuangan KPG yang belum sesuai dengan SAK ETAP, yaitu hanya menyajikan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi membuat peneliti ingin melakukan penelitian di sana dengan tujuan agar KPG dapat menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku, yaitu SAK ETAP. Selain itu siklus akuntansi yang dilaksanakan pada KPG juga belum sesuai, yaitu tidak terdapat penjurnalan atas pengidentifikasian transaksi-transaksi yang ada. Hal ini secara otomatis akan berdampak pada kegiatan selanjutnya pada siklus akuntansi, terutama hasil dari penyajian laporan keuangannya, karena sangat rentan apabila terjadi kesalahan pencatatan transaksi yang telah dilakukan. Dalam hal ini, peneliti juga ingin lebih mendalami proses penyusunan laporan keuangan dengan melakukan pengamatan mengenai pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan yang ada pada KPG. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti menentukan judul sebagai berikut **“ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

BERDASARKAN SAK ETAP (STUDI KASUS PADA KOPERASI PASAR GONDANGLEGI)”.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana pengidentifikasian, pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan dalam proses penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP di Koperasi Pasar Gondanglegi?

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis bagaimana pengidentifikasian, pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan dalam proses penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP di Koperasi Pasar Gondanglegi.

B. Manfaat Penelitian

1. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang bagaimana proses penyusunan laporan keuangan koperasi berdasarkan SAK ETAP.

2. Koperasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Koperasi Pasar Gondanglegi (KPG) dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.

3. Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pengetahuan kepada peneliti lain apabila menghadapi dan mengatasi masalah yang sama dengan Koperasi Pasar Gondanglegi (KPG).

4. Pemerintah dan Para Pengambil Keputusan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan.

1.4. Batasan Penelitian

Untuk batasan penelitian tersebut yaitu hanya pada permasalahan mengenai penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP pada Koperasi. Dengan banyaknya unsur-unsur yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan dan keterbatasan penelitian maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian menjadi suatu batasan dalam melakukan analisis laporan ini. Batasan tersebut yaitu :

1. Pengidentifikasian, pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pengungkapan akun-akun yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan Koperasi Pasar Gondanglegi (KPG) tahun 2014 yang akan disesuaikan dengan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.
2. Penyajian laporan keuangan (*financial statement*) Koperasi Pasar Gondanglegi (KPG) tahun 2014.